BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk keseragaman Standar Biaya yang dipergunakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012, dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan hasil asistensi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten masih ada standar yang belum tertuang dalam Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);

7. Undang-Undang...../2

Dipindai dengan CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 822 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;
20. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2012 tentang APBK Simeulue Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN...../3

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Ketentuan didalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai berikut :

Lampiran I Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 09 November 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 13 Februari 2012 M
20 Rabi'ul Awal 1433 H

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 13 Februari 2012 M
20 Rabi'ul Awal 1433 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH

DRS. NASKAH BIN KAMAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19590505 198603 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 4

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 4 Tahun 2012
Tanggal : 13 Februari 2012 M
20 Rabi'ul Awal 1433 H
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

STANDARISASI HARGA YANG BERLAKU UNTUK
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2012

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012 (Rp)	MAX ORANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1	PAGU DANA s/d Rp. 250 Juta			
	1.1 Pengguna Anggaran	OB	500,000	
	1.2 Kuasa Pengguna Anggaran	OB	400,000	
	1.3 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	OB	350,000	
	1.4 PPK-SKPD	OB	300,000	
	1.5 PPTK-SKPD	OB	275,000	
	1.6 Bendahara Pengeluaran	OB	250,000	
	1.7 Pengelola Barang	OB	250,000	
	1.8 Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	225,000	
	1.9 Staf Pengelola PPK		225,000	
2	PAGU DANA DIATAS Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta			
	2.1 Pengguna Anggaran	OB	550,000	
	2.2 Kuasa Pengguna Anggaran	OB	475,000	
	2.3 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	OB	425,000	
	2.4 PPK-SKPD	OB	400,000	
	2.5 PPTK-SKPD	OB	375,000	
	2.6 Bendahara Pengeluaran	OB	350,000	
	2.7 Pengelola Barang	OB	350,000	
	2.8 Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	300,000	
	2.9 Staf Pengelola PPK	OB	300,000	
3	PAGU DANA DIATAS Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar			
	3.1 Pengguna Anggaran	OB	650,000	
	3.2 Kuasa Pengguna Anggaran	OB	550,000	
	3.3 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	OB	500,000	
	3.4 PPK-SKPD	OB	500,000	
	3.5 PPTK-SKPD	OB	475,000	
	3.6 Bendahara Pengeluaran	OB	450,000	
	3.7 Pengelola Barang	OB	450,000	
	3.8 Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	350,000	
	3.9 Staf Pengelola PPK	OB	350,000	
4	PAGU DANA DIATAS Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar			
	4.1 Pengguna Anggaran	OB	850,000	
	4.2 Kuasa Pengguna Anggaran	OB	750,000	
	4.3 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	OB	650,000	
	4.4 PPK-SKPD	OB	600,000	
	4.5 PPTK-SKPD	OB	550,000	
	4.6 Bendahara Pengeluaran	OB	525,000	
	4.7 Pengelola Barang	OB	525,000	
	4.8 Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	400,000	
	4.9 Staf Pengelola PPK	OB	400,000	
5	PAGU DANA DIATAS Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar			
	5.1 Pengguna Anggaran	OB	1,000,000	
	5.2 Kuasa Pengguna Anggaran	OB	850,000	
	5.3 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	OB	700,000	
	5.4 PPK-SKPD	OB	650,000	
	5.5 PPTK-SKPD	OB	650,000	
	5.6 Bendahara Pengeluaran	OB	600,000	
	5.7 Pengelola Barang	OB	600,000	
	5.8 Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	450,000	
	5.9 Staf Pengelola PPK	OB	450,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012 (Rp)	MAX ORANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	**PAGU DANA DIATAS Rp. 5 Milyar**			
	6.1 Pengguna Anggaran	OB	1,250,000	
	6.2 Kuasa Pengguna Anggaran	OB	900,000	
	6.3 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	OB	800,000	
	6.4 PPK-SKPD	OB	750,000	
	6.5 PPTK-SKPD	OB	700,000	
	6.6 Bendahara Pengeluaran	OB	650,000	
	6.7 Pengelolaan Barang	OB	650,000	
	6.8 Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	500,000	
	6.9 Staf Pengelola PPK	OB	500,000	
7	**BENDAHARA UMUM DAERAH DAN STAF**			
	7.1 BUD	OB	2,800,000	
	7.2 Kuasa BUD	OB	2,300,000	
	7.3 Pengelola Kas Daerah	OB	2,000,000	
	7.4 Kuasa Pengguna Anggaran PPKD	OB	1,500,000	
	7.5 PPK PPKD	OB	1,300,000	
	7.6 Bendahara PPKD	OB	1,000,000	
	7.7 Staf Pengelola Kas Daerah	OB	750,000	
	7.8 Pembantu Bendahara PPKD	OB	650,000	
	7.9 Staf Pengelola PPK PPKD	OB		
8	**BENDAHARA PENERIMAAN**			
	8.1 Diatas 10 Juta s/d 50 Juta	OB	200,000	
	8.2 Diatas 50 Juta s/d 100 Juta	OB	250,000	
	8.3 Diatas 100 Juta s/d 1 Milyar	OB	350,000	
	8.4 Diatas 1 Milyar	OB	450,000	
9	**Tim Tehnis dan Pengawas Lapangan Kegiatan Fisik**			
	9.1 Tim Tehnik Kegiatan untuk dana diatas s/d 250 Juta	OB	200,000	
	9.2 Pengawas Lapangan (fisik)	OB	200,000	
	9.3 Tim Tehnik Kegiatan untuk dana diatas 250 s/d 500 Juta	OB	220,000	
	9.4 Pengawas Lapangan (fisik)	OB	220,000	
	9.5 Tim Tehnik Kegiatan untuk dana diatas 500 s/d 1 Milyar	OB	240,000	
	9.6 Pengawas Lapangan (fisik)	OB	240,000	
	9.7 Tim Tehnik Kegiatan untuk dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	350,000	
	9.8 Pengawas Lapangan (fisik)	OB	350,000	
	9.9 Tim Tehnik Kegiatan untuk dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	400,000	
	9.10 Pengawas Lapangan (fisik)	OB	400,000	
	9.11 Tim Tehnik Kegiatan untuk dana diatas 5 Milyar	OB	425,000	
	9.12 Pengawas Lapangan (fisik)	OB	425,000	
B	**HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/**			
	UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
1	**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA 10 s/d 100 Juta**	OB	200,000	
	a. 1-5 Paket (4 Bulan)			
	b. 5-10 Paket (8 Bulan)			
	c. diatas 10 Paket (12 Bulan)			
2	**PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONTRUKSI)**			
	2.1 Diatas 100 juta s/d 200 Juta			3 ORANG
	1 Ketua	OP	350,000	
	2 Sekretaris	OP	250,000	
	3 Anggota	OP	225,000	
	2.2 Diatas 200 juta s/d 2,5 Milyar			3 ORANG
	1 Ketua	OP	600,000	
	2 Sekretaris	OP	450,000	
	3 Anggota	OP	400,000	
	2.3 Diatas 2,5 Milyar			5 ORANG
	1 Ketua	OP	1,000,000	
	2 Sekretaris	OP	800,000	
	3 Anggota	OP	700,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012 (Rp)	MAX ORANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
	3.1 Diatas 100 Juta s/d 200 Juta			3 ORANG
	1 Ketua	OP	275,000	
	2 Sekretaris	OP	205,000	
	3 Anggota	OP	135,000	
	3.2 Diatas 200 Juta s/d 2,5 Milyar			3 ORANG
	1 Ketua	OP	545,000	
	2 Sekretaris	OP	475,000	
	3 Anggota	OP	405,000	
	3.3 Diatas 2.5 Milyar			5 ORANG
	1 Ketua	OP	750,000	
	2 Sekretaris	OP	680,000	
	3 Anggota	OP	610,000	
C	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
1	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	OB	100,000	
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 10 juta s/d 100 Juta			1 ORANG
	a. 1-5 Paket (4 Bulan)			
	b. 5-10 Paket (8 Bulan)			
	c. diatas 10 Paket (12 Bulan)			
2	PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA			
	2.1. Diatas 100 Juta s/d 200 Juta			3 ORANG
	1. Ketua	OP	300,000	
	2. Sekretaris	OP	225,000	
	3. Anggota	OP	200,000	
	2.2. Diatas 200 Juta s/d 2,5 Milyar			3 ORANG
	1. Ketua	OP	400,000	
	2. Sekretaris	OP	350,000	
	3. Anggota	OP	300,000	
	2.3 Diatas 2,5 Milyar			5 ORANG
	1. Ketua	OP	500,000	
	2. Sekretaris	OP	400,000	
	3. Anggota	OP	350,000	
D	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			
1	Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja Yang Ditetapkan Atas Dasar SK Eselon II			6 ORANG
	1. Penanggung Jawab	OB	500,000	
	2 Koordinator	OB	450,000	
	3 Ketua/Wakil Ketua	OB	400,000	
	4 Anggota/Petugas	OB	300,000	
2	Honorarium Nara Sumber (Rakor, Sosialisasi, Bimtek)			6 ORANG
	1. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1,150,000	
	2. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	850,000	
	3. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	700,000	
	4. Moderator	OJ	400,000	
3	Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi			8 ORANG
	1. Penanggung Jawab	OK	400,000	
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	350,000	
	3. Sekretaris	OK	300,000	
	4. Anggota	OK	250,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012 (Rp)	MAX ORANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri			
	1. SLTA	OB	250,000	
	2. Sarjana Muda	OB	400,000	
	3. Sarjana S1	OB	600,000	
	4. Master (S2)	OB	800,000	
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati			15 ORANG
	1. Pengarah	OB	750,000	
	2. Penanggung Jawab	OB	700,000	
	3. Ketua	OB	650,000	
	4. Wakil Ketua	OB	500,000	
	5. Sekretaris	OB	450,000	
	6. Anggota	OB	400,000	
6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Eselon II			8 ORANG
	1. Ketua	OB	400,000	
	2. Wakil Ketua	OB	300,000	
	3. Sekretaris	OB	250,000	
	4. Anggota	OB	200,000	
7	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			8 ORANG
	1. Kepala/Koordinator	OB	450,000	
	2. Anggota	OB	350,000	
8	Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
	1. Penanggung Jawab	Oter	400,000	
	2. Redaktur	Oter	300,000	
	3. Penyunting/Editor	Oter	250,000	
	4. Design Grafis dan Fotografer	Oter	180,000	
	5. Sekretariat	Oter	150,000	
	6. Pembuat Artikel	Halaman	80,000	
9	Honorarium Tim Pengelola Website			
	1. Penanggung Jawab	OB	400,000	
	2. Redaktur	OB	350,000	
	3. Penyunting/Editor	OB	300,000	
	4. Web Admin	OB	250,000	
	5. Web Developer	OB	200,000	
	6. Pembuat Artikel	Halaman	100,000	
	7. Penerjemah (1500)	Karakter	90,000	
10	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Daerah (Simda)			
	1. Admin SIMDA	OB	1,000,000	
	2. Supervisor	OB	300,000	
	3. Operator Simda	OB	250,000	
	4. Operator Scaner SP2D	OB	250,000	
	5. Pemeliharaan Jaringan SIMDA SPKK	OP	50,000	
11	Honorarium Dokter/Paramedis			
	1. Dokter Spesialis Kontrak	OB	25,000,000	
	2. Penata Anastesi Kontrak	OB	10,000,000	
	3. Dokter Kunjungan Mata	Per Kjng	5,000,000	
	4. Dokter umum/drg RSUD	OB	1,500,000	
	5. Dokter Puskesmas Alafan	OB	4,000,000	
	6. Dokter/drg Puskesmas Simeulue Barat	OB	3,000,000	
	7. Dokter/drg Puskesmas Salang	OB	2,250,000	
	8. Dokter/drg Puskesmas Simeulue Tengah	OB	2,000,000	
	9. Dokter/drg Puskesmas Teluk Dalam	OB	1,750,000	
	10. Dokter/drg Puskesmas Teupah Selatan	OB	1,250,000	
	11. Apoteker Kontrak	OB	1,500,000	
	12. Perawat Mahir Mata	OB	3,000,000	
	13. Radiasi Roncent	OB	450,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012 (Rp)	MAX ORANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Honor Jaga Malam Satpam	OM	25,000	
13	Honor Dokter Jaga UGD	OM	50,000	
14	Insentif Jaga Malam Para Medis dan Penunjang Medis	OM	25,000	
15	Insentif Menko Jaga (RSUD)	OM	40,000	
16	Honorarium Operator Komputer Berbentuk Jaringan	OB	250,000	
17	Insentif Operator Alat Berat (di luar jam dinas)	/Jam	30,000	
18	Honorarium ADC Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK/Sekda Honorarium Supir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Sekda Honorarium ADC Wakil Pimpinan DPRK/Asisten	OB OB OB	1,300,000 1,050,000 600,000	
19	Operator Alat Berat/Supir Truk sampah/Pemotong Rumput	OB	1,200,000	
20	Kernet Truk Sampah/Petugas Taman/Pengemudi Becak Sampah	OB	1,100,000	
21	Penyapu Jalan	OB	1,000,000	

1- BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Dipindai dengan CamScanner